

KEDAULATAN RAKYAT TAHUN 1974 – 1994**Ruth Madeleine Rubba**

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
ruthrubba@mhs.unesa.ac.id

Corry Liana

S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Pembredelan pers dilakukan secara masif pasca tragedi MALARI 1974. Begitu banyak surat kabar yang berhasil di bredel pada Orde Baru, namun lain halnya dengan surat kabar milik Yogyakarta yaitu Kedaulatan Rakyat yang berhasil melewati Orde Baru yang begitu represif serta pembredelan di tahun 1974 hingga 1994. Kedaulatan Rakyat tentu memiliki sebuah upaya agar terhindar dari pembredelan Orde baru serta berhasil melewati Orde Baru yang begitu mengekang pers khususnya surat kabar. Kedaulatan Rakyat mengambil langkah yang hati - hati serta selalu waspada agar tidak terbawa arus kritik terhadap pemerintah yang begitu tajam yang terjadi pada saat itu. Pada prosesnya Kedaulatan Rakyat ikut terlibat aktif dalam melakukan kritik terhadap kebijakan - kebijakan pemerintah maupun kondisi politik pada masa tersebut namun tetap dilakukan dengan prinsip meniti buih, ngono yo ngono, ning ojo ngono dan mili ning ora melu keli.

Kata Kunci: Kedaulatan Rakyat, Pembredelan**Abstract**

The banning of the press was carried out on a massive scale after the MALARI tragedy of 1974. So many newspapers were successfully banned in the New Order, but it was different from Yogyakarta-owned newspapers namely Kedaulatan Rakyat which succeeded in passing through the repressive New Order and banning in 1974 to 1994. Kedaulatan Rakyat certainly have an effort to avoid the banning of the New Order and to get past the New Order which is so constraining the press especially newspapers. Kedaulatan Rakyat took a cautious step and was always on guard so as not to be carried away by the current sharp criticism of the government at that time. In the process, the People's Sovereignty is actively involved in criticizing government policies and political conditions at the time, but still carried out in principle meniti buih, ngono yo ngono ning ojo ngono, mili ning ora melu keli.

Keywords: Kedaulatan Rakyat, Banned**PENDAHULUAN**

Kejayaan Orde Baru muncul setelah berhasil menghancurkan PKI. Pemerintahan Orde Baru menjadi awal dari perbaikan dan pembinaan kehidupan nasional di segala bidang, tidak terkecuali dalam bidang pers. Perbaikan dan pembinaan dalam bidang pers dilakukan secara sistematis serta terarah¹.

Tindakan perbaikan dan pembinaan dalam bidang pers secara sistematis dan terarah dibuktikan dengan terciptanya produk perundangan mengenai pers yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, yang selanjutnya dalam dinamisasi perbaikan dan pembinaan terdapat pengembangan perundangan.

Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1966

Tentang Ketentuan
Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1967, menjadi bentuk penyempurnaan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, selain terciptanya undang-undang, tercipta pula lembaga Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) merupakan surat izin yang diberikan oleh menteri penerangan kepada perusahaan atau penerbit pers untuk menyelenggarakan penerbitan pers, SIUPP hanya diberikan kepada setiap perusahaan atau penerbit pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung jawab. Tiap-tiap perusahaan atau penerbit pers mendapatkan 2 SIUPP dan penerbitan pers yang dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada SIUPP.

¹ Inge Hutagalung, 2013, "Dinamika Sistem Pers di Indonesia", *Jurnal Interaksi*, Vol. II (2)

Perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan yang terdapat pada SIUPP akan dilakukan pembatalan terhadap keluarnya SIUPP². Hal tersebut menjadi sebuah gambaran pelaksanaan pers yang dikendalikan oleh pemerintah atau kebebasan pers yang bertanggung jawab pada pemerintah yang merupakan suatu bentuk pengadopsian terhadap teori pers otoriter³.

Pers harus mau dan mampu untuk mengekang dirinya untuk tidak membuat berita yang bertentangan dengan kepentingan pemerintahan Soeharto⁴, pemerintah benar-benar memegang kontrol yang sangat ketat terhadap pers khususnya surat kabar. Kontrol yang dilakukan oleh pemerintah memiliki tujuan agar aktivitas pemberitaan dalam surat kabar tidak menyimpang dari pemerintah. Dalam melakukan kontrol tersebut, pemerintah melakukan banyak cara yang diantaranya adalah membuat sebuah regulasi untuk mengatur aktivitas surat kabar dalam bentuk undang-undang serta perizinan. Kuatnya campur tangan pemerintah dalam perkembangan pers berakibat pada kurangnya surat kabar yang kritis dalam merepresentasikan realitas yang ada di kalangan masyarakat. Surat kabar menghadapi banyak kesulitan ketika mereka harus dituntut untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang telah ditanggung.

Tekanan dari kekuasaan menjadikan pers terpaksa selalu beradaptasi dengan kepentingan kekuasaan pemerintah Orde Baru. Manifestasinya adalah dalam bentuk isi surat kabar yang cenderung menjadi seragam, memberikan ruang dan waktu yang tersedia bagi kepentingan-kepentingan pemerintahan itu serta lebih memilih untuk mengutamakan informasi yang bersifat politik. Bagi surat kabar yang melanggar ketentuan dari segala regulasi yang ada, nantinya mereka akan dikenakan sanksi mulai dari peringatan, pemberhentian penerbitan hingga menutup lembaga surat kabar yang bersangkutan⁵ atau yang lebih dikenal dengan istilah pembredelan pers.

Pembredelan pers dilakukan secara masif pasca tragedi Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) 1974. Peristiwa Malari merupakan protes besar pertama selama masa orde baru, protes tersebut memuat tentang penolakan penanaman modal asing serta penolakan terhadap kedatangan perdana menteri Jepang ke Indonesia.

Dengan kondisi perkembangan penyiaran berita pada waktu tersebut, banyak surat kabar yang memuat berita secara agresif sehingga pemerintah menganggap bahwa penyiaran berita yang ada dapat menghasut rakyat serta memantapkan dan memperkeruh situasi. Pasca tragedi Malari, setidaknya terdapat dua belas surat kabar yang harus kehilangan surat izin terbit dan surat izin cetak⁶ diantaranya adalah, Surat kabar Suluh Berita, Kami, Indonesia Raya, Abadi, The Jakarta Times, Pedoman, Nusantara, Indonesia Post, Kompas, Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, tidak sampai disitu, pada tahun 1994

terdapat tiga penerbitan pers yang mengalami pembredelan diantaranya adalah Tempo, Editor dan Detik. Editor dan Detik harus mengalami pembredelan karena telah melakukan kesalahan administratif sedangkan Tempo dibredel karena dianggap memberitakan hal-hal yang melanggar dan membahayakan stabilitas nasional.

Begitu banyak surat kabar yang berhasil di bredel pada Orde Baru, namun lain halnya dengan surat kabar milik Yogyakarta yaitu Kedaulatan Rakyat yang berhasil melewati Orde Baru yang begitu represif⁷ serta pembredelan di tahun 1974 hingga 1994. Kedaulatan Rakyat yang memiliki slogan '*Suara Hati Nurani Rakyat*' dalam pemberitaannya mungkin tidak terlepas mengenai kritik rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru, namun Kedaulatan Rakyat tentu memiliki sebuah upaya agar terhindar dari pembredelan Orde baru serta berhasil melewati Orde Baru yang begitu mengekang pers khususnya surat kabar. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan, peneliti memutuskan untuk melakukan sebuah penelitian kepada surat kabar harian Kedaulatan Rakyat dalam upayanya menghindari pembredelan serta berhasil melewati Orde Baru.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, untuk mengumpulkan sumber primer dan sekunder yang berupa wawancara, arsip koran, dokumen dan buku-buku pendukung. Kritik intern untuk membaca isi sumber yakin koran dan buku milik PT. Kedaulatan Rakyat tahun 1974 – 1994 untuk mengetahui sejarah dan perkembangan koran Kedaulatan Rakyat serta upayanya dalam menghindari pembredelan. Kemudian interpretasi untuk menghubungkan sumber-sumber sejarah yang diperoleh untuk selanjutnya dilakukan historiografi yakni penulisan cerita sejarah yang berasal dari sumber-sumber yang diperoleh.

HASIL PEMBAHASAN

Kedaulatan Rakyat

Sejarah dan Perkembangan Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan Rakyat pertama kali terbit pada 27 September 1945 tepat 40 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI di Yogyakarta dan merupakan salah satu surat kabar perdana yang terbit setelah Indonesia merdeka. Dalam edisi perdana surat kabar Kedaulatan Rakyat dicetak sebanyak 1.000 eksemplar dan diedarkan ke seluruh wilayah Yogyakarta dan sekitarnya itu mengangkat judul "Indonesia Merdeka Adalah Tjiptaan Indonesia Sendiri." Di hari kedua, jumlah Kedaulatan Rakyat langsung meningkat menjadi 3.000 eksemplar dan bertambah 1.000 eksemplar lagi pada hari ketiga. Kedaulatan Rakyat akhirnya menjadi koran perjuangan dalam masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu.

² Dr. J.C.T Simorangkir, S.H, 1986, "*PERS, SIUPP DAN WARTAWAN*", Jakarta: Gunung Agung, hlm. 35

³ Ibnu Hamad, 2004, *Kontruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta:Granit

⁴ Adisubrata, W. 2013. "Dari Presbreidel Ordonantie Tahun 1931 Hingga Kemerdekaan Pers Dalam Era Reformasi". *Jurnal Dewan Pers*. Vol. 8

⁵ Amir Purba, 2006, "Perkembangan Kehidupan Pers Dari Rezim Orde Baru Ke Rezim Reformasi", *Jurnal Wawasan*, Vol. 12 (1).

⁶ Roswita Oktavianti, 2016, "Reportase Dalam Hegemoni Pemerintah dan Media: Studi Kasus Jurnalis Kepresidenan Era Soeharto dan Joko Widodo", *Jurnal Komunikasi Indonesia*. Vol. V (1)

⁷ Ivan Aditya, 2016, "Daya Tahan 'KR'", https://krjogja.com/web/news/read/10921/Daya_Tahan_KR (diakses pada Selasa 15 Januari 2019, pukul 19.00 WIB)

Surat kabar Kedaulatan Rakyat memiliki motto *Migunani Tumapring Liyan* (berguna bagi yang lainnya) yang memiliki arti bahwa surat kabar Kedaulatan Rakyat selalu berusaha untuk menjadi media yang berguna bagi banyak orang. Surat kabar Kedaulatan Rakyat mengantut prinsip kebudayaan Jawa.⁸

Seiring dengan perkembangan dan berjalannya waktu kiprah Kedaulatan Rakyat mulai meredup pada tahun 1947. Kedaulatan Rakyat, koran perjuangan yang pertama kali hadir di alam kemerdekaan Indonesia itu harus mengalami sekarat dan terancam tamat lebih cepat.

Samawi yang masih bertahan di Kedaulatan Rakyat tidak menginginkan koran yang susah payah dicetuskan itu harus mati begitu saja. Namun, disisi lain Samawi juga merasa kesulitan apabila harus mempertahankan Kedaulatan Rakyat sendirian setelah ditinggal para tokoh utamanya yang akhirnya membuat Samawi berpikir keras. Setelah berpikir keras, Samawi akhirnya teringat kepada koleganya, seorang jurnalis senior bernama Madikin Wonohito, yang dulu juga pernah membantunya saat menghidupkan kembali Sinar Matahari menjadi Kedaulatan Rakyat. Madikin menerima ajakan Samawi untuk ikut menegakkan Kedaulatan Rakyat dan KR pun berhasil bangkit dari keterpurukannya dan menjadi semakin kuat karena mendapat dukungan moral dan materi dari salah satu pemimpin kultural di Yogyakarta yaitu Pakualaman IX.

Kedaulatan Rakyat yang merupakan salah satu media berpengaruh di Yogyakarta, meskipun sempat berganti nama menjadi Dwikora di awal Orde Baru, Kedaulatan Rakyat tetap melaju mulus selama Orde Baru dibawah pimpinan yang dikenal represif terhadap media massa. Kedaulatan Rakyat dapat dikatakan tidak pernah mengalami pembredelan meski sempat diberi peringatan melalui surat beberapa kali namun tetap membuat Kedaulatan Rakyat bertahan selama masa Orde Baru.⁹

2. Yogyakarta dan Kedaulatan Rakyat

Daerah Istimewa Yogyakarta dan surat kabar Kedaulatan Rakyat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kedaulatan Rakyat adalah surat kabar yang begitu khas mewakili Yogyakarta, sehingga tidak lengkap apabila bukan Kedaulatan Rakyat yang dirujuk sebagai surat kabar yang bercitarasa “paling” Yogyakarta. Bahkan Kedaulatan Rakyat sendiri mengklaim dirinya sebagai “paling mengerti Jogja”.¹⁰ Seperti halnya proklamasi kemerdekaan Indonesia, surat kabar Kedaulatan Rakyat telah terbit sejak tahun 1945. Kelahiran Kedaulatan Rakyat menjadikan surat kabar tersebut sebagai surat kabar harian tertua di Indonesia yang masih tetap terbit hingga sekarang.¹¹

Kedaulatan Rakyat menjadi salah satu saksi sejarah Indonesia sehingga perannya sangat signifikan

dibandingkan dengan surat kabar lain yang usia penerbitannya masih baru.¹² Peran signifikan yang ditekankan dalam artikel ini adalah sebagai objek penelitian yang dilakukan oleh akademisi dan peneliti dari berbagai institusi dan daerah. Tidak hanya bagi kalangan akademisi dan peneliti, perusahaan persuratkabaran Kedaulatan Rakyat terutama juga memiliki peran yang penting bagi masyarakat Yogyakarta sebagai refleksi realita sosial untuk dapat mempertahankan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.¹³ Dalam sumber-sumber sejarah, Kedaulatan Rakyat cukup dikenal sebagai “surat kabar yang diterbitkan sejak masa pendudukan Jepang” dan itu menjadikan Kedaulatan Rakyat sebagai surat kabar tertua di Yogyakarta.

Posisi Surat Kabar Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta

Dari awal berdiri, Kedaulatan Rakyat sudah menjadi hal yang tidak pernah dipisahkan dari masyarakat Yogyakarta. Kondisi demikian bisa terjadi karena kekuatan dari Kedaulatan Rakyat (KR) itu sendiri. Dengan kekuatan yang sama, KR dapat selalu survive ditengah persaingan media massa yang makin hebat.

Kekuatan yang menjadikan Kedaulatan Rakyat menjadi berbeda diantara koran-koran lokal lainnya adalah karena KR memiliki sikap kehati-hatian, terlebih dalam memuat berita yang bersinggungan dengan kontek SARA. KR menjunjung tinggi mutu dan kualitas dari artikel yang akan mereka muat dalam media massa. Artikel yang layak dimuat seyogyanya dipersiapkan secara benar dan memiliki nilai yang bermanfaat bagi pembaca. Terbukti artikel KR memuat berbagai tulisan, opini maupun ide (pikiran) yang selalu menarik bagi para pembacanya.

KR memiliki filter terhadap berbagai produk iklan atau film yang dirasa menampilkan adegan ataupun gambar yang terkesan vulgar. KR menyadari kondisi psikologis para pembacanya yang akan merasa tertarik bilamana disuguhi gambar-gambar yang demikian. Mengingat hal yang demikian serta dalam rangka menjaga mutu dari KR itu sendiri, maka KR tidak secara sembarangan memuat gambar-gambar kedalam media mereka.

Hal lain yang membuat posisi Kedaulatan Rakyat menjadi berbeda atau kuat diantara koran-koran lokal lainnya adalah karena koran Kedaulatan Rakyat selalu setia dalam setiap pemberitaannya. Setia yang dimaksud adalah terhadap unsur-unsur kedaerahan. Karena Koran ini lahir dan tumbuh di Yogyakarta, maka koran ini juga identik dengan Yogyakarta yang penuh dengan kekayaan budayanya.

Pers Pada Masa Orde Baru Tahun 1974 – 1994

1. Lahirnya Orde Baru

Aksi demonstrasi dilakukan oleh mahasiswa ketika pelaksanaan sidang kabinet pada tanggal 11 Maret 1966,

⁸ Fahmi Aji, “Perkembangan Surat Kabar *Kedaulatan Rakyat* Dalam Perpolitikan Masa Kemerdekaan di Yogyakarta Tahun 1950 – 1967”, *Skripsi*, Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, 2018, hlm 67

⁹ Oka Kusumayudha, dkk, *Amanat Sejarah: Dari Pekik Merdeka Hingga Suara Hari Nurani Rakyat* (Yogyakarta: PT BP Kedaulatan Rakyat, 1996) hlm. 57

¹⁰ Tagline surat kabar Kedaulatan Rakyat dalam situs web resminya, <http://krjogja.com> (diakses pada Sabtu, 5 Oktober 2019, pukul 18.00 WIB)

¹¹ Oka Kusumayudha, dkk, *Amanat Sejarah: Dari Pekik Merdeka Hingga Suara Hari Nurani Rakyat* (Yogyakarta: PT BP Kedaulatan Rakyat, 1996) hlm. 2

¹² Arwan Tuti Artha, “Koran Tertua Objek Penelitian”, *Kedaulatan Rakyat* vol. 1, tahun LVII (27 September 2001).

kondisi di luar istana yang sangat mencekam yang disebabkan oleh adanya beberapa pasukan yang tidak dikenal mengakibatkan Presiden Soekarno langsung pergi meninggalkan sidang kabinet. Melihat situasi politik dan pemerintahan yang semakin tidak stabil dan diiringi oleh aksi demonstrasi yang terus meningkat akhirnya membuat Presiden Soekarno untuk memutuskan menandatangani "Surat Perintah 11 Maret" yang didalamnya berisikan Presiden memberikan perintah kepada Jenderal Soeharto untuk segera mengambil segala tindakan yang dianggap perlu demi menjamin adanya keamanan, ketenangan, stabilitas pemerintahan, revolusi, keselamatan pribadi serta kewibawaan Presiden/Pemimpin Besar Revolusi demi kesatuan Republik Indonesia dan untuk melanjutkan segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.

Beberapa bulan sesudah 11 Maret, suasana politik di Jakarta mengalami perubahan yang drastis. Angkatan Darat yang mendominasi pemerintahan mulai melakukan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan-kebijakan pokok Presiden Soekarno dalam bidang ekonomi dan politik luar negeri, seiring dengan meningkatnya kegiatan yang penuh dengan semangat dari para pemuda yang tergabung dalam kesatuan aksi yang telah bangkit melawan Presiden Soekarno dan menyatakan lahirnya Orde Baru dengan keluarnya surat perintah 11 Maret 1966 untuk menggantikan Orde lama

2. Sikap Pemerintah Orde Baru Terhadap Pers

Awal Orde Baru merupakan angin segar bagi para penyelenggara pers khususnya surat kabar, karena beberapa surat kabar yang pernah di brebel pada masa Orde Lama akhirnya diperbolehkan kembali terbit.

Pada awal pemerintahan Orde Baru kebebasan pers sempat dirasakan oleh para insan pers yang khususnya surat kabar, hal ini dapat terlihat dari sikap pemerintah Orde Baru yang memberikan ruang bagi para penyelenggara pers untuk bekerjasama dalam membangun pemerintahan Orde Baru secara penuh. Surat kabar memiliki peran penting dalam konsolidasi kekuasaan pemerintah Orde Baru, ini dapat dilihat dari surat kabar yang menyuarakan anti PKI setelah terjadinya peristiwa September 1965 dan usaha tersebut mendapatkan dukungan dari pemerintah Orde Baru dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pers merupakan unsur penting dalam lahirnya Orde Baru. Kebebasan pers yang dirasakan pada Orde Baru tidak dirasakan dalam waktu yang lama, setelah pemerintahan Orde Baru akhirnya mendapatkan dukungan penuh dengan diangkatnya Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia secara resmi pada bulan Maret 1968 dalam Sidang Umum MPRS V.¹⁴

3. Kondisi Pers Pada Masa Orde Baru

Sejak tahun 1966, pers Indonesia mulai menunjukan sikap kritis terhadap kekuasaan pemerintah Orde Baru yang terutama ditujukan pada fenomena korupsi yang terjadi dalam birokrasi Orde Baru.¹⁵ Sorotan dari surat kabar terhadap fenomena korupsi semakin sering mewarnai isi berita di surat kabar harian

yang dikenal sangat kritis terhadap perkembangan isu terkini pemerintahan. Sikap kritis yang ditunjukkan oleh pers membuat pemerintah menjadi berhati-hati terhadap pers dan mulai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan anti pers. Tindakan awal yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru terhadap pers adalah dengan memberikan imbauan atau peringatan kepada pers agar dapat lebih bertenggang rasa dalam melakukan kritiknya terhadap penguasa.¹⁶

Pada mulanya pemerintah Orde Baru menganggap pers sebagai partner dan masih diberikan ruang bebas. Tetapi seiring dengan sikap pers yang semakin kritis terhadap pemerintahan Orde Baru membuat pemerintah tidak dapat lagi menahan diri untuk melakukan tindakan anti pers yang lebih keras terhadap surat kabar yang dianggap sangat kritis terhadap isu-isu yang terkait dengan pemerintahan Orde Baru, menurut pemerintah pers yang dibiarkan begitu bebas dapat mengakibatkan terganggunya kestabilan politik. Sikap kritis pers inilah yang dianggap oleh pemerintah harus untuk dibatasi agar tidak mengganggu kestabilan politik akibat pemberitaan yang dibuat oleh pers.

Peristiwa 15 Januari 1974 atau yang dikenal dengan Malari (Malapetaka 15 Januari) menjadi titik tolak pemerintahan Orde Baru melakukan tindakan represif terhadap pers. Sikap represif yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pers semakin dirasakan oleh para insan pers di Indonesia. Beberapa minggu setelah terjadinya MALARI terdapat 12 penerbitan pers yang harus kehilangan Surat Izin Terbit (SIT) dan Surat Izin Cetak (SIC). Gelombang brebel yang terjadi di tahun 1974 secara dramatis menghancurkan hubungan kemitraan antara pemerintah dengan pers.

Setelah terjadinya MALARI, oleh aparat yang berwenang jurnalis yang dipandang menghina pemerintah Orde Baru, kontan masuk ke dalam daftar hitam tak sampai disitu pada masa itu, surat-surat kabar yang radikal disapu bersih oleh pemerintah. Tidak berhenti pada tahun 1974, empat tahun setelahnya yaitu pada tahun 1978 kembali terjadi muncul gerakan protes anti pemerintah dari golongan mahasiswa. Pada bulan Januari 1978, KOPKAMTIB menanggapi aksi yang dilakukan tersebut dengan memberangus seluruh dewan senat mahasiswa yang ada dan menjabut izin tujuh surat kabar Jakarta dan tujuh pers Mahasiswa. Berbeda dengan tahun 1974 dimana sederet koran yang dibredel kemudian harus mati, pada tahun 1978 surat-surat yang dibredel kembali diizinkan untuk beredar dalam hitungan minggu. Tekanan yang diterima oleh para insan pers memadamkan semangat perjuangan mereka.

Sikap anti pers oleh pemerintah Orde Baru semakin terlihat dan tidak lagi dapat ditoleransi dengan dilakukannya pencabutan Surat Izin Terbit (SIT) majalah mingguan dwi berita *Expo* pada bulan Januari 1983. Tidak berhenti disitu, pada bulan Mei 1984 majalah fokus akhirnya juga harus merasakan kehilangan izin terbit.

4. Kebijakan Pemerintah Orde Baru terhadap Pers

¹⁴ Harold Crouch, 1999, *Militer & Politik di Indonesia*, Jakarta: Surya Usaha Ningtias, hlm. 244

¹⁵ Akhmad Zaini Abar, 1995, *1966-1974 Kisah Pers Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, hlm. 69

¹⁶ Akhmad Zaini Abar, 1995, *1966-1974 Kisah Pers Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, hlm. 69

Kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap pers terdapat dalam Undang-Undang PP No. 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, Undang-Undang PP No. 4 Tahun 1967 yang merupakan penambahan atas Undang-Undang PP No. 11 Tahun 1966, Undang-Undang PP No. 21 Tahun 1982 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang PP No. 11 Tahun 1966. Dari undang-undang yang beberapa kali mengalami perubahan, kemudian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Surat Izin Terbit (SIT)

Undang-undang Pokok Pers No. 11 Tahun 1966, Pasal 20 ayat 1 dalam masa peralihan keharusan mendapat Surat Izin Terbit masih berlaku sampai keputusan pencabutannya oleh pemerintah atau DPR (GR).¹⁷ Ketentuan mengenai SIT dalam UU Pokok Pers diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Penerangan No. 03/Per/Menpen/1969.¹⁸

2. Surat Izin Cetak (SIC)

Pasca terjadinya peristiwa September 1965 menjadikan diberlakukan pula Surat Izin Cetak (SIC), yang dikeluarkan oleh Pelaksana Khusus (Laksus) Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah (Kopkamtibda). Dengan adanya SIC tersebut, Laksus berhak penuh untuk melakukan pemanggilan kepada wartawan yang dianggap perlu untuk dimintai keterangan. Nomor Izin Cetak harus dicantumkan pada setiap penerbitan pers.

3. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP)

Ketentuan tentang penyelenggara pers di Indonesia sejak tahun 1966 sudah tertuang dalam Undang-undang Pokok Pers No. 11 Tahun 1966, undang-undang ini lalu diperbarui lagi dengan Undang-undang Pokok Pers No. 4 tahun 1967 dan yang terakhir kali diperbarui dengan Undang-undang Pokok Pers No. 21 tahun 1982.¹⁹ Kebijakan pers yang tertuang dalam bentuk undang-undang pokok pers sudah beberapa kali mengalami perubahan yang pada akhirnya menjadi undang-undang pokok pers tahun 1982, perubahan-perubahan yang dilakukan pada pasal-pasal dalam undang-undang pokok pers tidak bersifat fundamental, hanya terdapat beberapa kebijakan tambahan terhadap pers yang secara langsung berlaku pada pers Indonesia secara meluruh yaitu dapat dilihat dari salah satu pasal seperti pasal 13 yang ditambah ayat (5) yang berbunyi “setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers selanjutnya disingkat SIUPP yang dikeluarkan oleh pemerintah.

C. Upaya Kedaulatan Rakyat Untuk Bertahan Selama Masa Orde Baru Tahun 1974 – 1994

1. Meniti Buih

Kedaulatan Rakyat sebagai salah satu perusahaan surat kabar yang masih bertahan hingga saat ini, mengalami fenomena pemberedelan pers pada tahun 1974 hingga 1994. Meskipun mengalami fenomena tersebut, faktanya Kedaulatan Rakyat tidak pernah mengalami

pencabutan atas SIC dan SIT yang mereka miliki, artinya Kedaulatan Rakyat tidak mengalami pemberedelan pers namun tetap menerima surat peringatan dari pemerintah. Sebagai perusahaan surat kabar yang tidak mengalami pemberedelan tentu Kedaulatan Rakyat memiliki upaya tersendiri agar dapat terhindar dari gelombang pemberedelan hingga akhirnya mampu bertahan selama masa orde baru yang begitu represif terhadap pers.

Kedaulatan Rakyat mengambil langkah yang hati-hati serta selalu waspada agar tidak terbawa arus kritik terhadap pemerintah yang begitu tajam yang terjadi pada saat itu. Pada prosesnya Kedaulatan Rakyat ikut terlibat aktif dalam melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah maupun kondisi politik pada masa tersebut namun tetap dilakukan dengan prinsip “Meniti Buih”.

Prinsip ‘Meniti Buih’ ini sendiri merupakan penggambaran sikap yang diambil oleh Kedaulatan Rakyat dalam menyikapi maraknya dilakukan pencabutan SIC dan SIT oleh pemerintah terhadap pelbagai perusahaan surat kabar. Sebagai contoh konkrit dari prinsip meniti buih, Kedaulatan Rakyat mengikuti aturan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, namun disisi lain Kedaulatan Rakyat tetap melakukan fungsinya sebagai pengawas pemerintah dengan memberikan kritik-kritik, yang disampaikan dengan kehati-hatian dan waspada serta diakulturasi dengan budaya Jogja.²⁰ Melalui prinsip “meniti buih” ketika Kedaulatan Rakyat memberikan catatan, kritik, maupun saran kalimat yang digunakan banyak memutar dan tidak langsung kepada pokok persoalan.²¹

2. Ngonong Ya Ngonong, Ning Ojo Ngonong

Prinsip ‘meniti buih’ yang diterapkan oleh Kedaulatan Rakyat menjadi semakin kuat karena Kedaulatan Rakyat juga menggunakan istilah Jawa “ngonong ya ngonong, ning ojo ngonong” istilah ini digunakan oleh para wartawan / jurnalis Kedaulatan Rakyat untuk melakukan kritik. Bagi Kedaulatan Rakyat, kritik yang efektif justru kritik yang tidak membuat orang lain marah dan kritik yang dilakukan tidak harus dengan memukul atau membuat sakit pihak yang di kritik.²² Istilah ini menjadi pendukung bagi ‘meniti buih’ Kedaulatan Rakyat dan membuat Kedaulatan Rakyat semakin mampu untuk bertahan pada masa orde baru yang begitu represif.

3. Mili Ning Ora Melu Keli

Tidak hanya sampai di ‘ngonong ya ngonong, ning ojo ngonong’ kekuatan dari prinsip ‘Meniti Buih’ juga di dukung dengan istilah jawa yang dikenal ‘mili ning ora melu keli’ merupakan ajaran atau nilai budaya jawa untuk dapat bertahan dalam menghadapi tirani penguasa atau dalam rangka menghadapi perubahan zaman yang bertentangan dengan jati diri.²³

Istilah ini digunakan oleh perusahaan Kedaulatan Rakyat untuk tetap bertahan dengan pendirian dan sikapnya yang lebih condong pada fungsional antara redaksi dengan pembaca dan ‘suara hati nurani rakyat’

¹⁷ T. Atmadi, *Sistem Pers Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 131

¹⁸ Abdurrahman Surjomiharjo, 2002, *Beberapa Segi Perkembangan Pers di Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, hlm. 186

¹⁹ Sularto, 2001, *Humanisme dan Kebebasan Pers*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, hlm. 92

²⁰ Wawancara mendalam dengan narasumber

²¹ Yukie, H. Rusdie, 1995, *Setengah Abad Meniti Buih*, Yogyakarta: Yayasan Kubus Pustakama, hlm. 173

²² Octo Lampito, 2005, *Seteguh Hati Sekokoh Nurani*, Yogyakarta: PT. BP Kedaulatan Rakyat, hlm. 145

²³ Octo Lampito, 2005, *Seteguh Hati Sekokoh Nurani*, Yogyakarta: PT. BP Kedaulatan Rakyat, hlm. 160

adalah moto yang mencerminkan hal tersebut. Kedaulatan Rakyat juga menganut sikap moderat yang tidak memihak pada siapapun (golongan, partai, agama).²⁴ Meski Kedaulatan Rakyat juga hampir terseret dalam suatu aliran politik, namun Kedaulatan Rakyat mampu untuk melepaskan diri dari pengaruhnya.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, penerbitan surat kabar oleh Kedaulatan Rakyat dari hari ke hari semakin digerogoti dengan ideologi-ideologi dari luar yang dibawa oleh para redaktornya sendiri. Akhirnya, pimpinan umum Kedaulatan Rakyat memberikan ketegasan bahwa jika ada yang ingin membawa Kedaulatan Rakyat untuk masuk dan ikut ke dalam suatu golongan tertentu, maka saat itu juga akan diberhentikan dari tugasnya sebagai di penerbitan surat kabar tertentu sehingga Kedaulatan Rakyat tetap menjadi surat kabar yang tidak memihak pada golongan atau ideology tertentu (independen).

Begitupun pada masa orde baru, Kedaulatan Rakyat tidak tergoda untuk menjadi alat propaganda bagi pemerintah, Kedaulatan Rakyat tetap menjalankan fungsi menyuarakan hati nurani rakyat.²⁵ Karena tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, Kedaulatan Rakyat akhirnya mengalami krisis karena tidak ada pihak yang memberikan suntikan dana bagi keperluan produksi koran Kedaulatan Rakyat. Namun Kedaulatan Rakyat dapat menyiasatinya dengan mencari penulis cerita bersambung untuk dimuat dalam korannya dan dengan siasatnya tersebut Kedaulatan Rakyat akhirnya mampu meningkatkan penjualan koran milik Kedaulatan Rakyat tersebut dan dapat terus bertahan.

PENUTUP

Simpulan

Kehadiran koran Kedaulatan Rakyat merupakan hal yang begitu istimewa bagi masyarakat Yogyakarta. Kedaulatan Rakyat dan Yogyakarta adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena Kedaulatan Rakyat erat dengan unsur-unsur kebudayaan daerah khususnya Yogyakarta, Kedaulatan Rakyat juga memberikan berita yang cepat dan tepat sasaran.

Pemberitaan yang dilakukan oleh Kedaulatan Rakyat khususnya saat membahas mengenai politik Kedaulatan Rakyat menguraikannya dengan kalem dan mendalam tanpa harus bermusuhan secara langsung dengan para penguasa, dengan tidak lupa selalu berpegang pada prinsip 'Meniti Buih'. Karena Kedaulatan Rakyat adalah koran yang menganut budaya jawa, maka dalam melakukan kritik terhadap pemerintah Kedaulatan Rakyat juga tidak lupa untuk berpegang pada istilah 'ngono yo ngono ning ojo ngono' sehingga kritik yang dilontarkan oleh Kedaulatan Rakyat bagi para pembacanya bukan merupakan kritik yang tajam dan langsung kepada sasaran.

Dengan hanya berfokus pada pengelolaan organisasi serta keberlangsungannya dalam ranah media, menjadikan surat kabar Kedaulatan Rakyat masih berdiri sampai saat ini. Dimana segala bentuk kegiatan surat kabar

Kedaulatan Rakyat tidak ada kaitannya dengan partai politik manapun. Ketika banyak surat kabar yang mulai menunjukkan keberpihakan terhadap partai atau golongan tertentu, Kedaulatan Rakyat tetap berpegang pada istilah / falsafah jawa yang dianutnya yaitu 'mili ning ora keli' dan hal tersebut menjadikan surat kabar Kedaulatan Rakyat hingga saat ini dapat berdiri secara independen meski sempat mengalami krisis karena tidak berafiliasi dengan partai politik manapun namun Kedaulatan Rakyat dengan kepiawaiannya mampu mensiasati itu semua dan hingga saat ini tetap menjadi media yang independen dengan tidak memihak kepada golongan manapun.

DAFTAR PUSTAKA

ARSIP

Arwan Tuti Artha. 2001. "Koran Tertua Objek Penelitian". Dalam Tajuk Rencana Kedaulatan Rakyat. Yogyakarta.

BUKU

- Abar, Ahmad Zaini. 1995. *1966 – 1974 Kisah Pers Indonesia*. Yogyakarta: LKIS
- Atmadi, T. 1985. *Sistem Pers Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Crouch, Harold. 1999. *Militer & Politik di Indonesia*. Jakarta: Surya Usaha Ningtias
- Kusumayudha, Oka, dkk. 1996. *Amanat Sejarah: Dari Pekik Merdeka Hingga Suara Hati Nurani Rakyat*. Yogyakarta: PT. BP Kedaulatan Rakyat.
- Lampito, Octo. 2005. *Seteguh Hati Sekokoh Nurani*. Yogyakarta: PT. BP Kedaulatan Rakyat
- Rusdie, H. Yukie. 1995. *Setengah Abad Meniti Buih*. Yogyakarta: Yayasan Kubus Pustakama.
- Sularto. 2001. *Humanisme dan Kebebasan Pers*. Jakarta: Kompas Media Nusantara

Jurnal

- Hutagalung, Inge. 2013. "Dinamika Sistem Pers di Indonesia". *Jurnal Interaksi*. Vol. II (2).
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Granit
- Adisubrata, W. 2013. "Dari Presbreidel Ordonantie Tahun 1931 Hingga Kemerdekaan Pers Dalam Era Reformasi". *Jurnal Dewan Pers*. Vol. 8
- Oktavianti, Roswita. 2016. "Reportase Dalam Hegemoni Pemerintah dan Media: Studi Kasus Jurnalis Kepresidenan Era Soeharto dan Joko Widodo". *Jurnal Komunikasi Indonesia*. Vol. V (1)
- Purba, Amir. 2006. "Perkembangan Kehidupan Pers Dari Rezim Orde Baru Ke Rezim Reformasi". *Jurnal Wawasan*. Vol. 12 (1).

Laman Web

- Ivan Aditya. "Daya Tahan 'KR'". https://krjogja.com/web/news/read/10921/Daya_Tahan_KR. Diakses pada Selasa, 15 Januari 2019. Pukul 19.00 WIB.
- <http://krjogja.com>. Diakses pada Sabtu, 5 Oktober 2019. Pukul 18.00 WIB.

²⁴ Titi Susanti, "Wanita dalam Pemberitaan Koran Lokal: Kedaulatan Rakyat 1965 – 1976", *Skripsi*, Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada, 2011.

²⁵ Octo Lampito, 2005, *Seteguh Hati Sekokoh Nurani*, Yogyakarta: PT. BP Kedaulatan Rakyat, hlm. 135

Skripsi

Fahmi Aji. 2018. “Perkembangan Surat Kabar *Kedaulatan Rakyat* Dalam Perpolitikan Masa Kemerdekaan di Yogyakarta Tahun 1960 – 1967”. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

Titi Susanti. 2011. “Wanita dalam Pemberitaan Koran Lokal: *Kedaulatan Rakyat* 1965 – 1976”. Skripsi. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

